

PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v7i2.585>

Transformasi Sistem Pangan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan di Kota Semarang

Food System Transformation and Implications for Food Security Policies in Semarang City

Hendra Kurniawan¹, Arya Pradana², Dianis Januar Khoirunnisa³

^{1,2,3}Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Semarang

* Korespondensi Penulis Phone: +6283838323701, Email: hndrkurnwan25@gmail.com

Diterima : 20 Agustus 2025

Direvisi : 17 Desember 2025

Diterbitkan : 30 Desember 2025



This is an open access article under
the CC BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

PPTK is indexed Journal and
accredited as Sinta 4 Journal
(<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7050>)

ABSTRACT

Establishing a sustainable food system poses a significant challenge, particularly for policymakers. This study aims to identify the factors driving the transformation of the food system in Semarang City and to examine the integration of food security policies implemented to address these issues. A qualitative descriptive approach was employed, using the Grounded Theory Analysis method. Data were collected through document review and interviews with stakeholders. The findings reveal that the distribution sector has the highest weighted score for problems, followed by consumption, and then production. Quick Wins interventions, integrating cross-sectoral policies, were implemented to steer the existing food system towards greater sustainability. This research recommends the importance of enhancing institutional capacity through the formation of regional regulations and indicators for evaluating policy implementation. This ensures that the process of cross-sectoral policy integration, from formulation to evaluation, remains coherent in achieving stated objectives.

Keywords: Food System Transformation; Policy Integration; Sustainable Development.

ABSTRAK

Menghadirkan sistem pangan yang berkelanjutan menjadi tantangan yang dihadapi khususnya bagi pemangku kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab transformasi sistem pangan yang terjadi di Kota Semarang dan integrasi kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dengan metode Grounded Theory Analysis menggunakan data yang terkumpul melalui hasil telaah dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan sektor distribusi menjadi permasalahan yang memiliki bobot skor terbesar, kemudian disusul oleh konsumsi, dan yang terakhir produksi. Intervensi melalui Quick Wins yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dilakukan untuk mengarahkan sistem pangan yang ada kearah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan peraturan daerah dan indikator untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah dilakukan. Sehingga proses integrasi kebijakan lintas sektoral yang dilakukan mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi dapat koheren untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kata kunci: Integrasi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, Transformasi Sistem Pangan

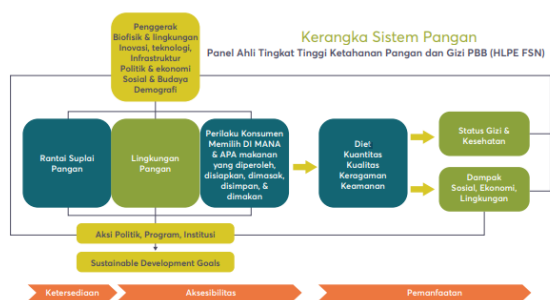
PENDAHULUAN

Sustainable Development Goal (SDGs) dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memastikan tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan. 17 tujuan ditetapkan dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Diantara 17 tujuan yang telah ditetapkan, pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang menjadi perhatian khusus melalui tujuan SDGs ke-2 yaitu tanpa kelaparan dan tujuan SDGs ke-12 yaitu menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi mengenai perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan, para pengambil keputusan dihadapkan pada tantangan yang berat. Tantangan untuk dapat merumuskan pedoman dan mendefinisikan intervensi yang tepat untuk sistem pangan berkelanjutan di daerah yang menjadi wewenangnya. Sistem pangan telah menjadi pembahasan yang populer, karena pendekatan ini menilai hubungan yang ada pada setiap pelaku dan aktivitas terkait yang memberikan nilai tambah dalam produksi, pengumpulan, pemrosesan, distribusi, konsumsi, pembuangan produk pangan yang berasal dari pertanian, kehutanan, atau perikanan serta pengaruhnya terhadap

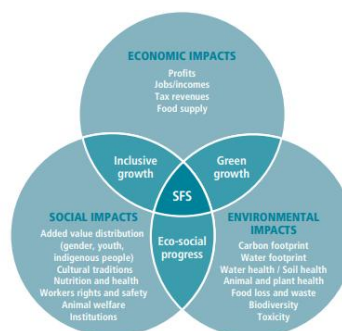
ekonomi, sosial, lingkungan. Sangat penting bagi negara berpendapatan menengah dan rendah (Low-Middle Income Countries / LMIC) yang ada di dunia untuk dapat memahami dengan baik sistem pangan yang dimilikinya untuk dapat mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif bagi wilayahnya (Brouwer, McDermott and Ruben, 2020).

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat kita lihat, untuk melakukan intervensi terhadap sistem pangan dapat dilakukan melalui berbagai aspek yang ada mulai dari produksi, pemrosesan, distribusi, lingkungan pangan hingga perilaku pangan (Herforth et al, 2017). Sistem pangan merupakan tempat dimana masyarakat berinteraksi dan keputusan konsumsi pangannya yang dipengaruhi berbagai macam aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan manusia mulai dari proses produksi, persiapan, distribusi, penyimpanan, pemrosesan dan limbah pangan (Ahmed, Downs and Fanzo, 2019) (Herforth et al, 2017). Aktivitas dan pola konsumsi pangan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bumi seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim (Swinburn et al., 2019).



Gambar 1. Sistem Pangan Berkelanjutan (Burey, Panchal, and Helwig 2021)

Sistem pangan yang ada pada saat ini berkontribusi hingga 30% dari total emisi Gas Rumah Kaca (Crippa et al., 2021) seperti yang terdapat dalam proses distribusi yang masih bergantung pada bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida dan dapat mengakibatkan penurunan hasil komoditas



Gambar 2. Kerangka Sistem Pangan (Koalisi Food and Land Use (FOLU) Indonesia, 2023)

pertanian negara penghasil jagung, kedelai dan beras (Fanzo and Miachon, 2023). Perubahan iklim dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi yang mengakibatkan menurunnya hasil komoditas pangan dan menyebabkan tidak stabilnya harga pangan yang mengancam ketahanan pangan dan keragaman pangan. Hal

ini juga dapat memperburuk akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki daya beli rendah untuk mendapatkan dan membeli makanan yang sehat yang ada di lingkungannya.

Transformasi sistem pangan diharapkan dapat membantu tercapainya hasil dari sistem pangan yang berkelanjutan seperti akses terhadap pangan yang aman dan terjangkau bagi semua orang, memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang sehat, serta berkontribusi bagi pendapatan hidup setiap orang, dan tidak merusak lingkungan (Denning, 2023). Setidaknya ada delapan akselerasi yang dapat dilakukan untuk melakukan transformasi terhadap sistem pangan. 1) Membangun kepercayaan di antara para pelaku sistem pangan. 2) Learning Mindset di antara semua pelaku sistem pangan. 3) Membuka ruang dialog antar pelaku sistem pangan. 4) Memberikan kepastian kebijakan dan regulasi. 5) Memberikan insentif dan disinsentif 6) perlindungan terhadap dampak tidak langsung yang tidak diinginkan. 7) memastikan stabilitas keuangan. 8) mengembangkan 'jalur transisi' untuk merinci bagaimana perubahan sistem pangan akan dicapai. (Herrero et al., 2020)

Sebagai salah satu Kota Metropolitan yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia, sistem pangan yang ada di Kota Semarang juga mengalami dinamika dalam perkembangannya. Hal ini dapat kita lihat melalui perubahan alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Semarang mulai 1999 hingga tahun 2021. Pada tahun 1999, Kota Semarang memiliki luas lahan terbangun seluas 8.107 Ha (20,90%) dan non terbangun seluas 30.692 Ha (79,10%) (Zahra et al., 2021). Namun pada tahun 2021 Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam perubahan penggunaan lahan, dengan luas lahan terbangun seluas 27.546 Ha (69%) dan non terbangun seluas 12.360 Ha (31%). Meningkatnya luasan lahan terbangun menyebabkan serangkaian permasalahan lahan, perairan dan pangan di Kota Semarang. Menurunnya ruang resapan air, berkurangnya lahan pertanian berkelanjutan, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan, sehingga Kota Semarang mengandalkan daerah lain dalam pemenuhan

kebutuhan pangannya (Bappeda Kota Semarang, 2022).

Meskipun tidak memiliki lahan yang cukup untuk memproduksi pangan, namun restoran yang ada di Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak restoran di Kota Semarang sejumlah 1.824 restoran dan memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp146.158.818.822,00 (Bapenda, 2019), sedangkan pada tahun 2023 jumlah wajib pajak restoran mengalami peningkatan menjadi sejumlah 2.497 restoran dan memberikan sumbangsih PAD sebesar Rp238.209.441.914 (Bapenda, 2023). Tumbuhnya restoran yang ada di Kota Semarang memberikan banyak pilihan makanan bagi masyarakat baik yang sehat, ataupun tidak sehat dan tidak bergizi. Seringkali masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di pusat kota mengalami gentrifikasi dengan masuknya penduduk berpenghasilan tinggi yang menciptakan akses pangan yang hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya. Dalam hal ini, tumbuhnya restoran atau tempat makan dapat juga membatasi akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di pusat kota (Sullivan, 2014). Ketimpangan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses pangan yang sehat karena berbagai macam faktor seperti pendapatan, kepemilikan kendaraan, jaringan sosial dan keluarga, serta sumber daya waktu (Ploeg et al., 2015).

Saat ini banyak penelitian terkait sistem pangan yang hanya berada pada tataran aspek fisik sehingga aspek-aspek dinamis untuk memahami transformasi sistem pangan sering kali terlewatkan (Feola, 2015). Kebijakan pengelolaan pangan yang ada juga masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara utuh untuk melakukan transformasi terhadap sistem pangan yang ada (Edwards, Sonnino and López Cifuentes, 2024). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami transformasi sistem pangan yang ada di Kota Semarang dan kebijakan pangan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan intervensi terhadap sistem pangannya untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan wawancara. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan tim kerja perencanaan ekonomi sumber daya alam Bappeda Kota Semarang. Tim kerja ini menjadi koordinator perencanaan program yang membidangi pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Kota Semarang. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen terkait pengelolaan pangan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dan penelitian sebelumnya. Data yang didapatkan meliputi rencana pola ruang, alih fungsi lahan, gambaran umum penyelenggaraan pangan di Kota Semarang seperti ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, konsumsi pangan rumah tangga, pemanfaatan pangan, kerawanan pangan, logistik dan distribusi pangan, serta permasalahan-permasalahan terkait pangan lainnya.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan content analysis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Patton, 2009). Pengumpulan data dan reduksi data dilakukan menggunakan metode Grounded Theory Analysis. Metode ini memungkinkan pengembangan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan baik melalui wawancara, tinjauan dokumen, keterlibatan langsung ataupun partisipasi, bukan dari asumsi atau hipotesis yang sudah ada (Wulandari, 2024). Tahapan yang ada dalam metode ini meliputi penentuan masalah, penyusunan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, pengkodean dan

analisis data serta mengembangkan teori yang didapatkan (Ding, L., & Kinnucan 2011).

Pengkodean yang digunakan adalah pengkodean terbuka (open coding). Semua data yang ada terkait transformasi sistem pangan yang terjadi di Kota Semarang diidentifikasi, dianalisis untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Grounded Theory Analysis biasa digunakan untuk membuat spesifikasi terhadap kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena, tindakan atau interaksi yang merupakan respon terhadap suatu kondisi dan konsekuensi yang timbul khususnya dalam transformasi sistem pangan yang terjadi di Kota Semarang (Ayu and Budiasih, 2013).

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan program quick wins ketahanan pangan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang ke dalam hasil coding yang didapatkan menggunakan metode Grounded Theory Analysis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil Coding dan Quick Wins untuk mendapatkan kesimpulan perihal intervensi kebijakan sistem pangan di Kota Semarang dan rekomendasi pelaksanaan kedepan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pengkodean terbuka dilakukan dengan mengelompokkan setiap pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi literatur yang didapatkan kedalam kategori yang sesuai dan kemudian dilakukan pembobotan skoring seperti yang dapat kita lihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Coding

Sumber Data	Coding	Kategori		
		Keter-sediaan	Keter-Jangka uan	Pe-manfaat-an
Tim Kerja Sub Koordinasi Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam Bappeda Kota Semarang	Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Semarang menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan di Kota Semarang	1		
	Kota Semarang hanya memiliki luasan lahan produktif seluas 8.050,5 Ha atau 21% dari luas Kota Semarang	1		
	Pemenuhan pangan di Kota Semarang bergantung pada rantai pasok pangan yang panjang karena 89% bahan pangan berasal dari daerah diluar Kota Semarang		1	

Sumber Data	Coding	Kategori		
		Keter-sediaan	Keter-Jangka uan	Pe-manfaat-an
Tim Kerja Sub Koordinasi Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam	Kerjasama antar daerah dengan produsen asal untuk pemenuhan pangan Kota Semarang masih belum optimal		1	
	Persentase pengeluaran perkapita konsumsi makanan di Kota Semarang mencapai 40,43%			1
	Fluktuatifnya harga pangan di Kota Semarang		1	
	Meningkatnya jumlah restoran dan tempat makan yang menjual makanan jadi tidak diiringi dengan kemampuan Kota Semarang dalam memproduksi bahan pangan sendiri	1		
Dokumen Kajian Masterplan Pengembangan Kawasan Korporasi Berbasis Sumber Daya Alam di Kota Semarang	Transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan Ekonomi Petani dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Petani (BUMP)		1	
Dokumen Kajian Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	Belum optimalnya peran aktor lintas sektor dalam penanganan dan penyediaan pangan di Kota Semarang		1	
	Minimnya akses permodalan usaha bagi pelaku dibidang perikanan	1		
	Masyarakat Kota Semarang lebih banyak membeli makanan yang sudah jadi dibanding bahan pangan segar		1	
	Adanya pemborosan pangan (<i>food waste</i>)			1
	Belum adanya sistem informasi pangan daerah yang <i>up to date</i> dan komprehensif		1	
	Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan penerapan teknologi tepat guna (TTG)	1		
	Belum semua industri dan pelaku usaha pangan di Kota Semarang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang			1
	Belum adanya sistem pencadangan makanan seperti lumbung pangan untuk melakukan kontrol terhadap persediaan dan harga bahan pangan		1	
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)			1
	Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan melalui kelompok tani, Gapoktan atau Kelompok Wanita Tani (KWT)		1	
	Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan			1
	Adanya disparitas harga yang diterima petani dan konsumen sebagai akibat dari panjangnya rantai pasok pangan Kota Semarang		1	
Dokumen Kajian Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Kota Semarang	Belum seimbang pola konsumsi pangan masyarakat Kota Semarang sesuai dengan rekomendasi “ Isi Piringku ” yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan			1
Dokumen Kajian Evaluasi Rencana Aksi Daerah	Mayoritas masyarakat di Kota Semarang sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis			1

Sumber Data	Coding	Kategori		
		Keter-sediaan	Keter-Jangka uan	Pe-manfaat-an
(RAD) Pangan dan Gizi Kota Semarang	Masih ditemukannya kasus stunting gizi tidak baik di Kota Semarang			1
	Penanganan <i>food loss</i> and <i>food waste</i> pada rumah tangga di Kota Semarang masih terbatas pada pemilahan sampah			1
	Terjadi pergeseran kebiasaan masyarakat yang semula berbelanja di pasar tradisional bergeser menjadi berbelanja di tukang sayur keliling, dan kios penjual sayur didekat rumah		1	

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Tabel 2. Hasil Theme Coding

Kategori	Skor	Tema		
		Produksi	Distribusi	Konsumsi
Ketersediaan	4	5		
Keterjangkauan	10		11	
Pemanfaatan	11			9
Total Skor	25	5	11	9

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Setelah melakukan skoring terhadap pengkodean yang dikelompokkan sesuai kategori. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengelompokkan jumlah skor yang didapatkan di setiap kategori ke dalam 3 komponen yang ada dalam sistem pangan yaitu produksi, distribusi, konsumsi (Béné et al., 2019). Produksi pangan di Kota Semarang dengan lahan pertanian dan keberadaan industri makanan dan minuman yang ada masih belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan pangan di Kota Semarang sangat bergantung pada pasokan dari berbagai sumber di sekelilingnya, misalnya seperti gudang beras pemerintah, pasar atau distributor bahan pangan hingga produsen bahan seperti Demak, Pati, Kudus, Klaten dan sekitarnya. Sehingga dapat kita lihat pada tabel 2 di atas yang menunjukkan tema distribusi memiliki skor tertinggi di banding dengan tema yang lain (Bappeda, 2022). Selain itu dari aspek konsumsi, Kota Semarang juga dihadapkan pada permasalahan tingginya food waste yang menjadi kontributor terbesar dalam komposisi sampah di Kota

Semarang yaitu sebesar 60,8% (SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup, 2024). Sementara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan menyebabkan sebagian kalangan masyarakat sulit mengakses pangan yang sehat, aman dan terjangkau. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya prevalensi balita stunting di Kota Semarang yaitu sebesar 1,04 atau 845 jiwa (Bappeda, 2023).

Transformasi sistem pangan dapat dilakukan melalui integrasikan kebijakan pangan secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar komponen sistem pangan. Pengintegrasian kebijakan pangan dapat dilakukan melalui lembaga publik yang memiliki legitimasi, kekuasaan, dan sumber daya untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi transformasi sistem pangan ke arah yang diharapkan (Denning, 2023) dan dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Melalui misi ke 3 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 2029 yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar

berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak. Pemerintah Kota Semarang menyusun arah kebijakan yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target

tujuan dan sasaran RPJMD yang beberapa diantaranya adalah memperkuat ketahanan pangan kota dan memberikan perlindungan konsumen dan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

Tabel 3. Bentuk *quick wins* transformasi sistem pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang

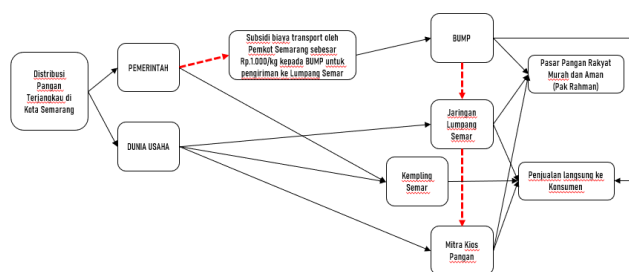
Kategori	Program	Keterangan
Produksi	Tanam cabe dan bawang merah untuk tekan inflasi (Tancab Bang Tani)	Upaya pemerintah Kota Semarang untuk menekan inflasi dengan budidaya tanam cabai dan bawang serentak di Kota Semarang
	Pengembangan bibit varietas padi unggul yang toleran terhadap salinitas atau air asin	Pengembangan Bibit Padi Biosalin untuk pengembangan pertanian di Kawasan Pesisir Kota Semarang
	Pertanian perkotaan (Urban Farming)	Gerakan seluruh lapisan elemen masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkotaan baik lahan terlantar, pekarangan, di atap bangunan, atau di dalam ruangan untuk penanaman pangan atau tanaman guna pemenuhan kebutuhan pangan atau mengurangi polusi udara.
	<i>Urban Farming Corner</i>	Pusat / sentra pembudayaan <i>urban farming</i> yang mencakup wahana edukasi, sosialisasi, konsultasi, promosi produk unggulan pertanian dan pelayanan " <i>homecare</i> " permasalahan pertanian perkotaan sebagai tempat <i>one stop services urban farming</i> di Kota Semarang
Distribusi	Lumbung pangan kota Semarang (Lumpang Semar)	Jaringan distribusi pangan yang bertujuan untuk mengedalikan inflasi terutama pada bahan pangan pokok, mempermudah akses pangan murah, dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan berkolaborasi dengan BUMP, BUMD Pangan, Bulog dan pelaku usaha pangan lainnya
	Pasar pangan rakyat murah dan aman (Pak Rahman)	Penyelenggaraan bazar komoditas pokok pangan murah dengan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok di Kota Semarang
	Ketahanan Pangan Keliling Semarang (Kempling Semar)	Program kolaborasi bersama Bank Indonesia yang mendekatkan akses pangan aman dan terjangkau untuk masyarakat melalui armada pangan keliling ke titik-titik yang terpantau mengalami lonjakan harga yang signifikan.
	Badan Usaha Milik Petani (BUMP)	Sebuah lembaga berbadan hukum yang beranggotakan kelompok tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok dalam bidang pertanian, meningkatkan skala ekonomi unit produksi usaha tani di Kota Semarang, dan bekerjasama dengan wilayah lain dalam penyediaan bahan pangan di Kota Semarang.
Konsumsi	Pelayanan Gizi dan Penyuluhan Kesehatan Anak Serta Remaja (Pelanggi Nusantara)	Pelayanan kesehatan terkait gizi bagi masyarakat di Kota Semarang yang bergerak Bersama dengan berbagai lintas sector dengan pendekatan Continuum of Care 1000 Hari Pertama Kehidupan dan wisata edukasi gizi.
	Gerakan sayang pangan kota Semarang (Garang Asem)	Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah limbah pangan (<i>food waste and food loss</i>) melalui gerakan Habiskan isi piringmu, Stop buang pangan dan berbagi pangan segar dan olahan.
	Pemantauan kualitas pangan dengan melibatkan warga (Mata Dewa)	Pemantauan keamanan pangan baik di lingkungan kantin sekolah, pk1 dan pasar yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemangku wilayah setempat
	Inkubasi pelaku agribisnis Kota Semarang melalui kegiatan <i>Food StartUp Challenge</i> , dan <i>Kita Tani Muda</i>	Program inkubasi bisnis yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencetak para pengusaha <i>milenial</i> baik ditingkat hulu atau hilir bidang pertanian, peternakan atau perikanan di Kota Semarang.

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2025)

Pada tabel 3 dapat kita lihat intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap sistem pangannya melalui program quick wins yang dikelompokkan kedalam komponen yang terdapat di sistem pangan yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Intervensi pada sektor produksi dilakukan dengan merangsang keterlibatan masyarakat untuk mengoptimalkan lahan yang ada guna melakukan pertanian perkotaan (urban farming). Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan lahan perkotaan tidak produktif yang dikelola pemerintah daerah. Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan produktivitas hasil pangan lokal

yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Pemerintah juga mengambil peran dalam pelaksanaan urban farming melalui penerbitan regulasi terkait, bantuan teknis pelaksanaan urban farming dan memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan komunitas lokal.

Intervensi pada sektor distribusi dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berperan untuk memangkas mata rantai distribusi produk pangan baik yang dihasilkan oleh petani yang ada di dalam Kota Semarang ataupun produk pangan yang didatangkan dari luar Kota Semarang.



Gambar 3. Intervensi Distribusi Pangan Kota Semarang

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Pada gambar 3 dapat kita lihat intervensi Pemerintah Kota Semarang pada sektor distribusi dilakukan dengan memberikan subsidi sebesar Rp 1.000 dari harga jual produk pangan BUMP yang dikirimkan kepada Lumpung Pangan Kota Semarang (Lumpung Semar). Lumpung Semar merupakan jejaring pelaku distribusi pangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang pada tiap Kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang. BUMP dan Lumpung Semar dapat menjual produk pangannya secara langsung kepada masyarakat atau melalui Bazar Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman). Bazar tersebut diselenggarakan oleh Pemkot Semarang dengan berkolaborasi dengan dunia usaha, BUMP dan Lumpung Semar untuk menyediakan bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan menekan inflasi bahan pangan pokok di Kota Semarang. Lumpung Semar juga bekerjasama dengan beberapa toko diwilayahnya yang biasa disebut dengan Toko

Mitra Kios Pangan. Kerjasama tersebut berupa penyediaan produk pangan terjangkau kepada toko mitra kios pangan, dengan perjanjian toko tersebut menjual produk dibawah harga pasar sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila Toko menjual produk di atas harga yang telah ditetapkan dapat berakibat pada berakhirnya hubungan kerjasama penyediaan produk pangan Lumpung Semar kepada toko mitra kios pangan.

Pengendalian harga pangan juga dilakukan melalui program kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang dan Bank Indonesia yaitu Ketahanan Pangan Keliling Semarang (Kempling Semar). Program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan menghadirkan delapan unit mobil pangan keliling untuk mendekatkan akses pangan terjangkau ke titik-titik lokasi yang terpantau mengalami lonjakan harga pangan yang signifikan.

Intervensi pada sektor konsumsi dilakukan di rumah Pelangi Nusantara dengan memberikan wisata edukasi gizi kepada pelajar di Kota Semarang. Wisata ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman gizi seimbang serta mensosialisasikan program penanggulangan stunting Pemkot Semarang. Rumah Pelangi Nusantara juga memberikan pelayanan kesehatan balita gizi buruk dan stunting di Kota Semarang secara komprehensif yang meliputi pelacakan dan pemeriksaan kesehatan balita gizi buruk dan stunting, serta monitoring pemantauan konsumsi makanan, status gizi, hasil pemeriksaan klinis balita gizi buruk dan stunting.

Melalui gerakan Garang Asem Pemerintah Kota Semarang melakukan sosialisasi serta edukasi gerakan sayang pangan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat perihal porsi makan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan habiskan. Pelatihan penanganan dan penyimpanan bahan pangan yang baik untuk mengurangi food loss. Pemasangan spanduk/brosur/baner dan media lain pada restoran, warung makan, ruang breakfast room hotel untuk mengkampanyekan Stop Buang Pangan. Serta bekerjasama dengan komunitas untuk mengelola makanan layak konsumsi baik dari hotel, restoran, warung makan, catering atau retail untuk disalurkan kepada warga yang kurang mampu, panti asuhan, panti weda, atau rumah singgah. Kurang mampu, panti asuhan, panti weda, atau rumah singgah.

Keamanan produk pangan di Kota Semarang juga dipantau oleh Kader Keamanan Waspada Pangan (Dermawan) melalui program pemantauan kualitas pangan dengan melibatkan Warga (Mata Dewa). Pemerintah Kota Semarang juga menyediakan mobil laboratorium untuk memastikan makanan yang dijual di kantin, pedagang disekitar sekolah serta di pasar tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan dan aman untuk dikonsumsi.

Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga melakukan inkubasi kepada pelaku agribisnis di Kota Semarang dengan harapan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, perikanan dan peternakan yang ada di Kota Semarang melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang kedepannya dapat

meningkatkan nilai jual produk lokal sehingga mampu menjadi produk yang tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri melainkan juga diluar negeri.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu daerah penunpu perekonomian di Jawa Tengah, Kota Semarang tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi penduduk asli melainkan juga penduduk tentatif yang mendiami Kota Semarang untuk menempuh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun sebagai pekerja komuter. Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kompleksitas sistem pangan yang ada di Kota Semarang. Kegagalan dalam memahami dan mengelola sistem pangan dapat memunculkan permasalahan ekonomi seperti terjadinya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan yang dapat menyebabkan inflasi harga pangan. Permasalahan sosial seperti gizi buruk dan stunting. Serta permasalahan lingkungan seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca, food loss and food waste.

Memahami dinamika sistem pangan yang terjadi melalui metode Grounded Theory Analysis, bagaimana cara mengelolanya, serta mengarahkannya melalui quick wins kebijakan yang terintegrasi dalam mengintervensi komponen sistem pangan seperti produksi, distribusi dan konsumsi secara holistik. Diharapkan dapat mendukung transisi sistem pangan di Kota Semarang menuju konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab serta tanpa kelaparan.

Studi ini memandang perlunya kebijakan yang terintegrasi untuk melakukan intervensi terhadap sistem pangan yang bersifat dinamis dalam pengelolaannya pada ruang lingkup perkotaan. Kebijakan terintegrasi dalam melakukan intervensi terhadap sistem pangan dapat berjalan dengan baik apabila pendekatan lintas sektor yang dilakukan terkoordinir dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan tindakan yang ada dapat saling mendukung satu sama lain untuk menghindari konsekuensi transformasi sistem pangan kearah yang tidak berkelanjutan.

SARAN

Kebijakan yang terintegrasi menjadi tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan saat ini. Kebijakan ini mengharuskan peningkatan koherensi pembuatan kebijakan dengan meyatukan berbagai aktor, untuk bernegosiasi, bermusyawarah dan menyepakati tindakan yang dilakukan. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada berbagai macam strategi dan bentuk intervensi yang berbeda serta melibatkan beragam instrumen kebijakan seperti sumber daya ekonomi, prosedur dan tata kelola.

Oleh sebab itu, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada melalui pembentukan peraturan daerah dan indikator untuk melakukan evaluasi kebijakan yang telah dilakukan. Peraturan daerah diharapkan menjadi instrumen yang dapat menjadi pedoman dan kerangka operasional yang kokoh bagi pelaksanaan implementasi aksi lintas sektor oleh masing-masing aktor yang terlibat khususnya dalam melakukan transformasi sistem pangan yang ada. Indikator untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan juga diperlukan untuk memastikan integrasi kebijakan lintas sektoral yang dilakukan mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi dapat konsisten dan koheren untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Domorenok, Graziano, and Polverari 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Selena, Shauna Downs, and Jessica Fanzo. 2019. "Advancing an Integrative Framework to Evaluate Sustainability in National Dietary Guidelines." *Frontiers in Sustainable Food Systems* 3 (September): 1–20. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00076>
- Ayu, I Gusti, and Nyoman Budiasih. 2013. "Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 9 (1): 19–27.
- Bappeda Kota Semarang. (2019). Buku Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2019.
- Bappeda Kota Semarang. (2023). Buku

Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

- Bappeda Kota Semarang. (2022). Penyusunan Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang
- Bappeda Kota Semarang. (2023). Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020-2024
- Béné, Christophe, Steven D. Prager, Harold A.E. Achicanoy, Patricia Alvarez Toro, Lea Lamotte, Camila Bonilla Cedrez, and Brendan R. Mapes. 2019. "Understanding Food Systems Drivers: A Critical Review of the Literature." *Global Food Security* 23 (April): 149–59. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.04.009>
- Brouwer, Inge D., John McDermott, and Ruerd Ruben. 2020. "Food Systems Everywhere: Improving Relevance in Practice." *Global Food Security* 26 (March): 100398. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100398>
- Burey, Paulomi P., Sunil K. Panchal, and Andreas Helwig. 2021. "Sustainable Food Systems." *Food Engineering Innovations Across the Food Supply Chain*, 15–46. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821292-9.00015-7>
- Crippa, M., E. Solazzo, D. Guizzardi, F. Monforti-Ferrario, F. N. Tubiello, and A. Leip. 2021. "Food Systems Are Responsible for a Third of Global Anthropogenic GHG Emissions." *Nature Food* 2 (3): 198–209. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9>
- Denning, Glenn. 2023. "8 Food Systems Transformation." *Universal Food Security*, 160–82. <https://doi.org/10.7312/denn19760-010>
- Ding, L., & Kinnucan, H. W. 2011. "Qualitative Research: A Grounded Theory Example and Evaluation Criteria1 مصدر." *American Journal of Agricultural Economics* 1 (Spring): 75–90.
- Domorenok, Ekaterina, Paolo Graziano, and Laura Polverari. 2021. "Introduction:

- Policy Integration and Institutional Capacity: Theoretical, Conceptual and Empirical Challenges.” *Policy and Society* 40 (1): 1–18. <https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1902058>.
- Edwards, Ferne, Roberta Sonnino, and Marta López Cifuentes. 2024. “Connecting the Dots: Integrating Food Policies towards Food System Transformation.” *Environmental Science and Policy* 156 (September 2023). <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103735>.
- Fanzo, Jessica, and Lais Miachon. 2023. “Harnessing the Connectivity of Climate Change, Food Systems and Diets: Taking Action to Improve Human and Planetary Health.” *Anthropocene* 42 (April): 100381. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2023.100381>.
- Feola, Giuseppe. 2015. “Societal Transformation in Response to Global Environmental Change: A Review of Emerging Concepts.” *Ambio* 44 (5): 376–90. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0582-z>.
- Herforth, Anna, and Selena Ahmed. 2015. “The Food Environment, Its Effects on Dietary Consumption, and Potential for Measurement within Agriculture-Nutrition Interventions.” *Food Security* 7 (3): 505–20. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0455-8>.
- Herrero, Mario, Philip K. Thornton, Daniel Mason-D’Croz, Jeda Palmer, Tim G. Benton, Benjamin L. Bodirsky, Jessica R. Bogard, et al. 2020. “Innovation Can Accelerate the Transition towards a Sustainable Food System.” *Nature Food* 1 (5): 266–72. <https://doi.org/10.1038/s43016-020-0074-1>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Kota Semarang [Online]. Dari <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/komposisi> [Diakses: 10 Juli 2025].
- Koalisi Food and Land Use (FOLU) Indonesia. 2023. Seri Buklet Berpikir Sistem untuk Sistem Pangan Berkelanjutan : Mengenal Sistem Pangan dan Kerangka Berpikir Sistem. Jakarta : The Food and Land Use Coalition.
- Ploeg, Michele Ver, Vince Breneman, Paula Dutko, Ryan Williams, Samantha Snyder, Chris Dicken, and Phil Kaufman. 2015. “Access to Affordable and Nutritious Food: Updated Estimates of Distance to Supermarkets Using 2010 Data.” *Food Shopping Patterns and Geographic Access to Food: Comparisons and Data*, no. November, 113–78.
- Sullivan, Daniel Monroe. 2014. “From Food Desert to Food Mirage: Race, Social Class, and Food Shopping in a Gentrifying Neighborhood.” *Advances in Applied Sociology* 04 (01): 30–35. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2014.41006>.
- Swinburn, Boyd A., Vivica I. Kraak, Steven Allender, Vincent J. Atkins, Phillip I. Baker, Jessica R. Bogard, Hannah Brinsden, et al. 2019. “The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission Report.” *The Lancet* 393 (10173): 791–846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8).
- Wulandari, Royani. 2024. “Strategi Berkelanjutan Dalam Mengatasi Krisis Sampah Di Kota Semarang.” *Inovasi* 21 (1): 1–14. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v21i1.852>.
- Zahra, Putri Ayu Az, Reny Yesiana, Pratamaningtyas Anggraini, and Intan Muning Harjanti. 2021. “Analisis Perkembangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lahan Terbangun Di Kota Semarang.” *Jurnal Riptek* 15 (1): 47–55. <https://doi.org/10.35475/riptek.v15i1.119>.